|  |
| --- |
| **PERUBAHAN**  **RENCANA STRATEGIS**  **2021-2026**  **KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM**  PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |

# DAFTAR ISI

[**DAFTAR ISI** i](#_Toc85704796)

[**DAFTAR TABEL** i](#_Toc85704797)i

**DAFTAR GAMBAR**……………………………………………………………………………………………………………….iii

**KATA PENGAN**T**AR**…………………………………………………………………………………………………………..…iv

[**BAB I** 1](#_Toc85704798)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc85704799)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc85704800)

[1.2 Landasan Hukum 2](#_Toc85704801)

[1.3 Maksud dan Tujuan 3](#_Toc85704802)

[1.4 Sistematika Penulisan 4](#_Toc85704803)

[**BAB II** 6](#_Toc85704804)

[GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM 6](#_Toc85704805)

[2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Cintapuri Darussalam 6](#_Toc85704806)

[2.2 Sumber Daya Kecamatan Cintapuri Darussalam 15](#_Toc85704807)

[2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam 17](#_Toc85704808)

[2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam 20](#_Toc85704809)

[**BAB III**](#_Toc85704810) 21

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam…………………………………… …………………………………………………… 21

3.2 Telaahan Visi, Misi an Program Kepaa Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih…… 22

3.2.1 Visi……………………………… …………………………………………………….…………………………..22

3.2.2 Misi………………… …………………………………………………………………………………….……….24

3.3 Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga dan Renstra Provinsi………… ……...………….25

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis…………………………………………………………….…………………….25

[**BAB IV** 27](#_Toc85704811)

[TUJUAN DAN SASARAN 27](#_Toc85704812)

[4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 27](#_Toc85704813)

[4.1.1. Tujuan 27](#_Toc85704814)

[4.1.2. Sasaran 27](#_Toc85704815)

[**BAB V** 30](#_Toc85704816)

[STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 30](#_Toc85704817)

[**BAB VI** 35](#_Toc85704818)

[RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN 35](#_Toc85704819)

[**BAB VI**I](#_Toc85704820) 55

[KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 55](#_Toc85704821)

[**BAB VIII** 56](#_Toc85704822)

[PENUTUP 56](#_Toc85704823)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar ….….15](#_Toc85704894)

[Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana ………16](#_Toc85704895)

[Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2016-2020 …..18](#_Toc85704896)

[Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar …19](#_Toc85704897)

Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar…………… ………………………………………………………………….21

Tabel 3.2 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026……………………….……...23

[Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah…………………………..29](#_Toc85704898)

Table 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2021-2026…...………………………………………………………….………………………….33

Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2021-2026…………………...……………………………………………………………..36

Tabel 7.1 Pnetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cintapuri Darussalam……………………..…55

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1.1** Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya……………………………………1

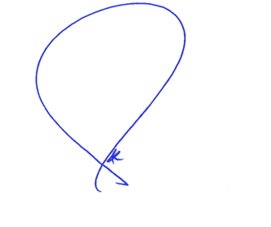
**Gambar 2.1** Bagan SOTK Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar……………………………7

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT dan dukungan dari semua staf Kecamatan Cintapuri Darussalam, maka penyusunan Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perubahan RENSTRA Kecamatan Martapura Tahun 2021-2026 ini disusun dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian Perubahan RENSTRA Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2021-2026 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan dan kegiatan secara akuntabel dan transparan.

Cintapuri Darussalam, 31 Desember 2021

Camat Cintapuri Darussalam,

H. SUYITNO, S.Sos.M.AP

Pembina Tk.I

NIP. 19660715 198703 1 013

# BAB I

# PENDAHULUAN

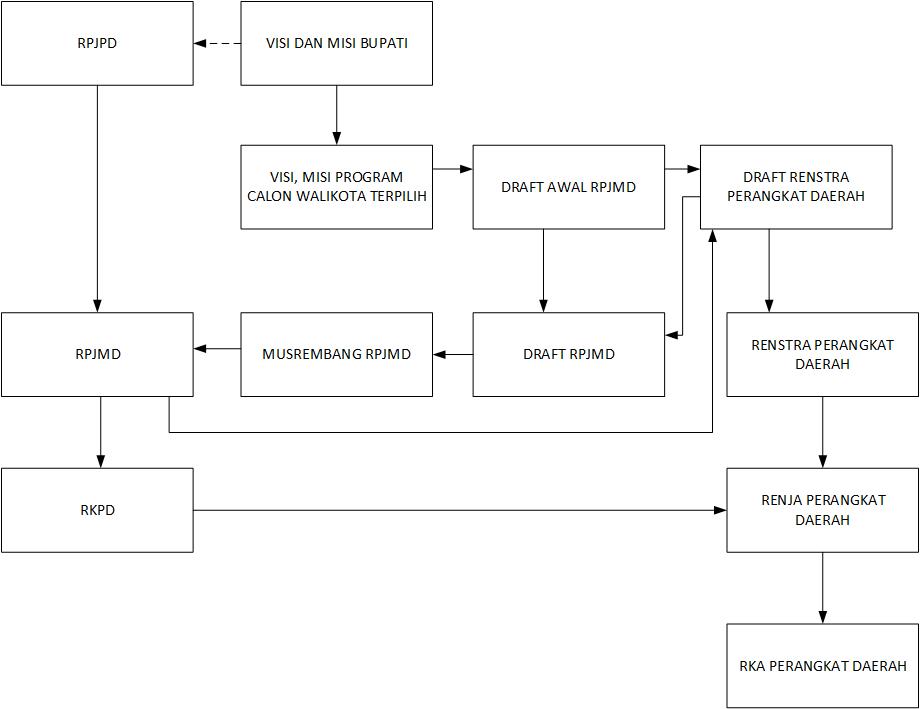
## Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana strategis perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan rencana kerja tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Gambar di bawah ini adalah gambar keterkaitan hubungan Resntra dengan dokumen perencanaan lainnya.



Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Perubahan Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2021-2026 ini disusun dalam rangka menyesuaikan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi KlarifikasI, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## Landasan Hukum

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cintapuri Darussalam 2021 -2026 Kabupaten Banjar didasarkan pada landasan kukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9;
4. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi KlarifikasI, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1. Peraturan Bupat Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

## Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam yang memuat program dan kegiatan.

## Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstran Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAB I** | : | **Pendahuluan**   * 1. Latar Belakang   2. Landasan Hukum   3. Maksud dan Tujuan   4. Sistematika Penulisan |
| **BAB II** | : | **Gambaran Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam**   * 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cintapuri Darussalam   2. Sumber Daya Kecamatan Cintapuri Darussalam   3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam   4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam . |
| **BAB III** | : | **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cintapuri Darussalam**   * 1. Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam .   2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.   3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.   4. Penentuan Isu-isu Strategis |
| **BAB IV** | : | **Tujuan, Sasaran** |
| **BAB V** | : | Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cintapuri Darussalam  **Strategi dan Arah Kebijakan**  Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Cintapuri Darussalam |
| **BAB VI** | : | **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**  Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatatif |
| **BAB VII** | : | **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**  Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD |
| **BAB VIII** | : | **Penutup**  Merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2021 -2026 |

# BAB II

# GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM

## Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Cintapuri Darussalam

Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 04 Juni 2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagian unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wulayah kecamatan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:

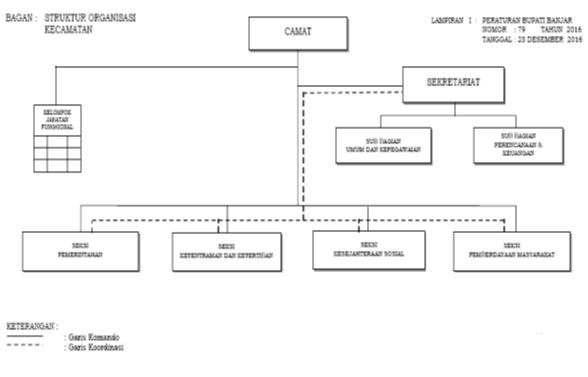
* 1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
  2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  3. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
  4. Pembinaan kesejahtraan sosial;
  5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
  6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Sedangkan susunan organisasi Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecaamatan, yang terdiri dari:
3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Kepala Seksi Pemerintahan
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:

**Gambar 2. 1. Bagan SOTK Kecamatan Cintapuri DarussalamKabupaten Banjar**



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 104 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

* + 1. **Camat**
       1. Merumuskan Visi, Misi, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;

1. Merumuskan kebijakan teknis pada Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
2. Menyelenggarakan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Kecamatan serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Kecamatan;
4. Mengawasi dan mengendalikan Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
5. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
6. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
7. Menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan;
8. Membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Kecamatan;
9. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum yang telah dilimpahkan kewenangannya;
10. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
11. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
12. Mengoordinasikan penerapan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
13. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
14. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat kecamatan;
15. Menyelenggarakan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Desa dan Kelurahan;
17. Merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan Kecamatan serta tugas-tugas pembantuan lainnya;
18. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
19. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.
    * 1. **Sekretaris Camat**
21. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
22. Memonitor pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
23. Menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumahtangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Kecamatan;
24. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
25. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
26. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
27. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
    1. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
28. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
29. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
30. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
31. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
32. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
33. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor dan rumah tangga di lingkungan Kecamatan;
34. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
35. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
36. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
37. Menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;.
38. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
39. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, penjagaan cuti, absensi pegawai;
40. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
41. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas SDM dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
42. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
    1. **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**
    2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
    3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (renstra) kecamatan;
    4. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan beserta dokumen penunjangnya;
    5. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
    6. Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan kecamatan;
    7. Menyusun profil kecamatan berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan kecamatan;
    8. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
    9. Menyusun laporan program dan kegiatan kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan kecamatan;
    10. Menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di kecamatan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawab, laporan akuntabilitas kinerja kecamatan berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan kecamatan;
    11. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan dan akuntansi keuangan kecamatan;
    12. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
    13. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
    14. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    15. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
    16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
        1. **Seksi Pemerintahan**
43. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pemerintahan;
44. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi pemerintahan;
45. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/kelurahan (data aparat desa/kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, peraturan desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
46. Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;
47. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pambakal/lurah, instansi vertikal dan unit kerja tingkat kecamatan;
48. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan pambakal;
49. Melaksanakan bimbingan pembuatan peraturan desa dan anggaran pendapatan belanja desa (apbdes);
50. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
51. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil antara lain pembuatan kartu tanda penduduk (ktp), kartu keluarga, laporan perkembangan sistem informasi administrasi kependudukan (siak) dan laporan kependudukan;
52. Membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/kelurahan termasuk permasalahan batas desa/kelurahan dan sengketa tanah;
53. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi surat keterangan tanah;
54. Melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
55. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait pemerintahan; dan
56. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
    * 1. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**
57. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja ketentraman dan ketertiban serta fasilitasi pembinaan polisi pamong praja;
58. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi ketentraman dan ketertiban;
59. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
60. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
61. Melaksanakan pengawasan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial, aset milik pemerintah daerah yang ada di wilayah kecamatan/kelurahan;
62. Melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
63. Melaksanakan monitoring kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
64. Melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah;
65. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat/pertahanan sipil;
66. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
67. Menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum seperti kriminalitas dan kenakalan remaja;
68. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait ketentraman dan ketertiban; dan
69. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
    * 1. **Seksi Kesejahteraan Sosial**
70. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
71. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
72. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat;
73. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data tentang organisasi sosial masyarakat, organisasi Karang Taruna, keluarga Pahlawan, perintis kemerdekaan dan veteran;
74. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data tentang keluarga fakir miskin, penyandang cacat, tuna susila, tuna karya, tuna wisma, eks narapidana, anak nakal/korban narkoba, anak terlantar, korban bencana dan panti asuhan;
75. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
76. Melaksanakan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
77. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha rehabilitasi penyandang cacat, tuna susila, tuna karya, tuna wisma, eks narapidana, anak nakal/korban narkoba, dan anak terlantar;
78. Melaksanakan fasilitasi kelancaran pemberian/penyaluran dan sumbangan sosial lainnya kepada fakir miskin, penyandang cacat, dan korban bencana alam;
79. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan inventarisasi dan pemeliharaan makam pahlawan/makam perintis kemerdekaan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
80. Membuat laporan tentang kejadian bencana alam untuk disampaikan ke instansi terkait;
81. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang terkait dengan keagamaan yang ada di wilayah Kerja Kecamatan seperti:
    * + 1. Jumlah tempat ibadah;
        2. Jumlah organisasi keagamaan;
        3. Jumlah pemeluk agama;
        4. Jumlah pekuburan (makam) termasuk makam pahlawan;
        5. Jumlah sarana pendidikan agama termasuk Pesantren dan Taman Pendidikan Alqur’an (TPA); dan
        6. Jumlah guru agama.
82. Melaksanakan komunikasi dan konsultasi serta menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembinaan kegiatan keagamaan seperti:
    1. Kegiatan Lembaga Penyelenggaraan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kecamatan;
    2. Kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan dan Unit Pengumpul Zakat; dan/atau
    3. Kegiatan Majelis Ta’lim dan Taman Pendidikan Alqur’an.
83. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an dan kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan;
84. Melaksanakan pelayanan pelegalisasian salinan (copy) Surat Keterangan Nikah dan rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah;
85. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait Kesejahteraan Sosial; dan
86. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
    * 1. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**
    1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Pemberdayaan Masyarakat;
    2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
    3. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat di bidang produksi, perkreditan, industri rumah tangga dan lain-lain;
    4. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi dan pembangunan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
    5. Melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/kelurahan atau dari dana bantuan lainya;
    6. Menyusun program serta pembinaan perekonomian masyarakat;
    7. Menyusun program serta penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
    8. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
    9. Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi yaitu:
       * 1. Rekomendasi untuk pengurusan Ijin Reklame dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bersifat komersial dan untuk fasilitas umum; atau
         2. Surat Keterangan Tempat Usaha dan lain-lain.
    10. Melaksanakan pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan untuk perumahan penduduk sesuai kewenangan Kecamatan;
    11. Menyiapkan bahan kegiatan operasional dalam rangka pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
    12. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketahanan masyarakat yg ada dalam wilayah kerja Kecamatan;
    13. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi :
        1. Penguatan lembaga kemasyarakatan;
        2. Perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
        3. Perpustakaan desa;
        4. Bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
        5. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
        6. Pengembangan tradisi dan budaya masyarakat.
    14. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan terhadap kegiatan yang meliputi :
        * 1. Pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
          2. Pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
          3. Penyusunan data profil desa/kelurahan;
          4. Pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
          5. Pembinaan desa miskin/tertinggal;
          6. Penataan ruang kawasan terpadu;
          7. Peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;
          8. Identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
          9. Rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
    15. Menyiapkan bahan pembinaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga (pkk);
    16. Melaksanakan fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
    17. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
    18. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat desa/kelurahan;
    19. Menyelenggarakan program pembangunan pengentasan kemiskinan;
    20. Menghimpun dan mengolah data organisasi perempuan yang ada di wilayah kerja kecamatan;
    21. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat; dan
    22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
        1. **Kelompok Jabatan Fungsional**
87. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
88. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
89. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat.

## Sumber Daya Kecamatan Cintapuri Darussalam

#### Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas. Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Cintapuri Darussalam.

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | **Jabatan** | **Eselon** | | | | **Golongan** | | | | **Tingkat Pendidikan** | | | | | |  |
| I | II | III | IV | IV | III | II | I | S2 | S1 | D3 | SMA | SMP | SD | JML |
| 1 | Camat |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Sekretaris |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Subbag Umpeg |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Subbag Peren & Keuangan |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 5 | Kepala Seksi Pemerintahan |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 6 | Kepala Seksi Trantib |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 7 | Kepala Seksi Kessos |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | Kepala Seksi PM |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 9 | Pelaksana |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 3 |
| 10 | Fungsional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tenaga Honor/Kontrak |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 5 | 1 |  | 8 |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |

#### Aset Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pemberdayaan Kecamatan Cintapuri Darussalam belum cukup memadai sehingga perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama Barang | Banyaknya | | Kondisi Barang | | |
| B | KB | RB |
| 1 | Kendaraan Roda 4 | 1 | Unit |  |  |  |
| 2 | Kendaraan Roda 2 | 33 | Unit |  |  |  |
| 3 | Printer | 6 | Buah |  |  |  |
| 4 | Komputer PC | 5 | Buah |  |  |  |
| 5 | Laptop/Notebook | 6 | Buah |  |  |  |
| 6 | Meja Kerja/ Meja Rapat | 16 | Buah |  |  |  |
| 7 | Lemari/ Filling Kabinet | 12 | Buah |  |  |  |
| 8 | Alat Rumah Tangga | 8 | Buah |  |  |  |
| 9 | AC | 7 | Unit |  |  |  |
| 10 | UPS | 2 | Unit |  |  |  |
| 11 | Kursi Kerja/ Kursi Rapat | 11 | Buah |  |  |  |
| 12 | Microphone Wireless M11c |  | Buah |  |  |  |
| 13 | Sound System | 2 | Buah |  |  |  |
| 14 | LCD Proyektor | 2 | Buah |  |  |  |
| 15 | Mesin Tik | 1 | Buah |  |  |  |
| 16 | Tempat Tidur | 1 | Buah |  |  |  |
| 17 | Bendera Pataka | 1 | Buah |  |  |  |
| 18 | Kompor Gas | 1 | Buah |  |  |  |
| 19 | Lemari Es | 1 | Buah |  |  |  |
| 20 | Televisi | 2 | Buah |  |  |  |
| 21 | Kipas Angin | 2 | Buah |  |  |  |
| 22 | Portable Generating Set | 1 | Buah |  |  |  |
| 23 | Lemari Makan | 1 | Buah |  |  |  |
| 24 | Tangga Alumunium | 1 | Buah |  |  |  |
| 25 | Mesin Potong Rumput | 1 | Buah |  |  |  |
| 26 | Tabung Gas | 2 | Buah |  |  |  |
| 27 | Camera Video | 1 | Buah |  |  |  |
| 28 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 1 | Buah |  |  |  |
| 29 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 1 | Buah |  |  |  |
| 30 | Tugu Pembangunan Lain-lain | 1 | Buah |  |  |  |
| 31 | Gedung Garasi | 1 | Buah |  |  |  |
| 32 | Jaringan Distribusi | 1 | Buah |  |  |  |
| 33 | Meja Rapat | 1 | Buah |  |  |  |

Sumber : Data BMD Kecamatan Cintapuri Darussalam, Per- Maret 2021

## Kinerja Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam

Sesuai tugas dan fungsinya, yaitu pelayanan kepada masyarakat, maka selama kurun waktu tahun 2016-2021 Pemerintah Kecamatan Cintapuri Darussalam telah secara nyata melaksanakan serta pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat di lihat dari nilai capaian SKM berturut – turut sebagai berikut:

1. SKM Kecamatan Cintapuri Darussalam tahun 2016 dengan nilai / skor 67,58;
2. SKM Kecamatan Cintapuri Darussalam tahun 2017 dengan nilai / skor 82,50;
3. SKM Kecamatan Cintapuri Darussalam tahun 2018 dengan nilai / skor 84,81;
4. SKM Kecamatan Cintapuri Darussalam tahun 2019 dengan nilai / skor 84,55;
5. SKM Kecamatan Cintapuri Darussalam tahun 2020 dengan nilai / skor 84,94.
   1. **Perkembangan Kinerja Pelayanan kecamatan Cintapuri Darussalam**

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2016-2021, Kecamatan Cintapuri Darussalam memberikan pelayanan dalam bidang administrasi, barang dan jasa. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel - Tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2016-2020

| **NO** | **Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah** | **Target NSPK** | **Target IKK** | **Target Indikator Lainnya** | **Target Renstra SKPD Tahun Ke -** | | | | | **Realisasi Capaian Tahun Ke -** | | | | | **Rasio Capaian Pada tahun ke -** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** | **(15)** | **(16)** | **(17)** | **(18)** | **(19)** | **(20)** |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cintapuri Darussalam |  |  |  |  | 78 | 79 | 82 | 82 | 67,58 | 82,50 | 84,81 | 84,55 | 84,94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Anggaran pada Tahun 2016-2020 | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun 2016-2020 | | | | | Capaian Anggaran Tahun | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belanja Daerah | 928.605.000 | 1.127795.000 | 2.369.236.000 | 1.422.902.152 | 1.268.533.000 | 816.755.300 | 1.090.393.863 | 2.150.663.650 | 1.189.894.810 | 867.348.551 | 87,96 | 96,68 | 95,11 | 83,62 | 68,37 |
| Belanja Tidak Langsung | 610.930.000 | 608.730.000 | 504000.000 | 504.000.000 | 862.180.000 | 501.279.500 | 584.280.000 | 454.000.000 | 409.816.555 | 535.461.987 | 82,05 | 95,98 | 90,08 | 81,31 | 80,80 |
| Belanja Langsung | 317.675.000 | 519.065.000 | 1.865.236.000 | 918.902.152 | 406,353,000 | 315.475.800 | 506.113.863 | 1.696.663.650 | 780.078.255 | 331,886,564 | 99,31 | 99,34 | 90,96 | 87,62 | 88,48 |

## Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam

#### Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain adalah:

1. Adanya jarak yang cukup jauh antara kantor kecamatan dengan sebagian desa yang ada serta masih terdapat beberapa jalan penghubung yang kondisinya sulit dan rusak serta belum adanya transportasi umum sehingga masyarakat merasa sangat kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi yang mereka perlukan.
2. Kurang maksimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang kegiatan Pelayanan PATEN seperti jaringan internet beserta peralatan penunjang lainnya.
3. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan dokumen lainnya dalam pengurusan administrasi.
4. Lemahnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan
5. Masih adanya jalur birokrasi yang panjang dalam pengurusan dokumen dari Instansi di atasnya sehingga banyak waktu yang tidak dapat dioptimalkan.
6. Sistem Inovasi yang dapat membantu memberikan kemudahan, kelancaran serta efektif dan efisien masih belum ada.

#### Peluang

Disamping itu juga terdapat peluang yang dapat membantu Kecamatan Cintapuri Darussalam dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam. Peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

* + - 1. Adanya kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
      2. Adanya peluang untuk mengikuti Bimbingan/Latihan Teknis
      3. Adanya Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan.

# BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM

## Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai saat ini dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan Cintapuri Darussalam beserta faktor- faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cintapuri Darussalam

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **MASALAH POKOK** | **MASALAH** | **AKAR MASALAH** |
| 1. | Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan | Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan | Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan |
| Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan |
| Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Pengoptimalan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan. |
| Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan |
| Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan | Pengoptimalan pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan |
| Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan |
| Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan | Pengoptimalan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan peraturan perundangan. |
|  | Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan |

## Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar .

### Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke-4.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2021- 2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 3.2 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

|  |  |
| --- | --- |
| **PILAR-PILAR VISI** | **PENJELASAN** |
| MAJU | * Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang. * Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks   pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development* |
| MANDIRI | * Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. * Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. * Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah. |
| AGAMIS | Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama. |

### Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Cintapuri Darussalam harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Cintapuri Darussalam yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021 - 2026, secara umum Kecamatan Cintapuri Darussalam mendukung pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tgas dan fungsi Kecamatan Cintapuri Darussalam berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 4 dalam RPJMD 2021-2026 yakni “**4. Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.**”

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu tujuan 4.1: Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif dengan indicator Indeks Reformasi Birokras. Dan untuk mencapai tujuan tersebut ada 6 sasaran, dimana Kecamatan Cintapuri Darussalam mendukung sasaran 4.1.2 yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran 4.1.2 tersebut terdapat 1 strategi, yaitu Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat (strategi 4.2 RPJMD) .

* 1. **Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi**

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar menjadi pertimbangan bagi Kecamatam Cintapuri Darussalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Cintapuri Darussalam yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Kecmatan Cintapuri Darussalam yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam antara lain:

1. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid 19 menyebabkan terhambatnya pembanguanan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan public belum sepenuhnya teralisasi;

2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Cintapuri Darussalam, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.

## 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yg dikedepankan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Renstra, penentuan isu-isu strategis

Sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal.

Isu – Isu Strategi di Kecamatan Cintapuri Darussalam , yaitu:

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum, yang meliputi :
2. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Ke Kecamatan
3. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
6. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan

# BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Kecamatan Cintapuri Darussalam menetapkan tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran sebagai berikut:

### Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Cintapuri Darussalam memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun subkegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Teselenggaranya reformasi dalam pelayanan Publik”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan definisi operasional sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tingkat kepuasan masyarkat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara. Formulasinya adalah (Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang. (Rujukan : Peraturan Menteri Pendyaagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat)

### Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam menetapkan sasaran yaitu: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Tujuan/**  **Sasaran** | | **Indikator Tujuan** | **Indikator Sasaran** | **2021** | **Target Kinerja**  **Tujuan dan Sasaran** | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat |  | 86 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88,31 |
|  |  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan |  | Nilai Evaluasi Kecamatan | - | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 |

Sumber data: RPJMD Kabupaten Banjar 2021 – 2026

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan maupun subkegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Kecamatan Cintapuri Darussalam adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Cintapuri Darussalam, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cintapuri Darussalam serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cintapuri Darussalam. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Sasaran yang akan diwujudkan Kecamatan Cintapuri Darussalam adalah **Meningkatknya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.** Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

1. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

1. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan.

Strategi dan arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu : Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

1. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

1. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan.

Sttrategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi informasi dalam berbagai aspek secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cintapuri Darussalam dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2021 – 2026**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Visi : Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis. | | | |
| Misi : Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik , Bersih dan Efektif | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik | **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan** | 1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan | Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan |
| 1. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan. |
| 1. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan | Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait . |
| 1. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan | Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan |
| 1. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan |
| 1. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah | Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan. |

Sumber Data : Diolah

# BAB VI

# RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menginformasikan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Kecamatan Cintapuri Darussalam dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program dan rencana subkegiatan untuk setiap kegiatan, lengkap dengan indikatornya. Pemilihan program dan kegiatan maupun subkegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan maupun subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan maupun subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selain hal tersubut di atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah tentu membutuhkan dukungan dana atau pembiayaan. Pembangunan akan terus berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan apabila didukung pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan angggaran setiap tahunnya. Oleh karena itu penyediaan sumber-sumber pendanaan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang berkelanjutan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Kecamatan Cintapuri Darussalam masuk dalam Unsur Kewilayahan yang mengampu Bidang Urusan Pemerintahan telah menyusun Program/Kegiatan/SubKegiatan sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut di atas.

Selengkapnya terkait dengan program dan kegiatan maupun sub kegiatan pada Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2021 -2026 tersaji pada tabel berikut

Tabel 6.1 Program, Kegiatan Dan Subkegiatan pada Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2021 -2026

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | | | | | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan** | **Definisi Operasional** | **Formulasi Perhitungan** | **Realisasi 2021** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja SKPD Penanggung jawab** | **Lokasi** |
|  |  | **Tahun 2022** | | **Tahun 2023** | | **Tahun 2024** | | **Tahun 2025** | | **Tahun 2026** | | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD** | |
|  |  | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** |
| **1** | **2** | **4** | | | | | **5** | **-6** |  |  |  | **-8** | **-9** | **-10** | **-11** | **-12** | **-13** | **-14** | **-15** | **-16** | **-17** | **-18** | **-19** | **-20** | **-21** |
| **Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik** |  |  | | | | |  | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** | **IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan yang diterima oleh masyarakat, dengan unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan SKM sesuai dengan Permenpan 14 Tahun 2017, yaitu: persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan masukan; sarana dan prasarana** | **Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang** | **86** | **84** | **2.432.623.974** | **85** | **2.539.928.933** | **86** | **2.641.526.090** | **87** | **2.747.187.134** | **88,31** | **2.857.074.619** | **88,31** | **13.218.340.750** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  | **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan** |  |  |  |  |  |  | **Nilai Evaluasi Kecamatan** | **Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyeenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **75 (Rencana Range Nilai 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)** |  | **70** | **2.432.623.974** | **73** | **2.539.928.933** | **77** | **2.641.526.090** | **81** | **2.747.187.134** | **85** | **2.857.074.619** | **85** | **13.218.340.750** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  | **Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian** | **7** | **1** | **1** |  |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cintapuri Darussalam** |  |  |  | **73** | **2.316.809.574** | **74** | **2.409.481.957** | **76** | **2.505.861.235** | **78** | **2.606.095.685** | **80** | **2.710.339.512** | **80** | **12.548.587.963** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | **7** | **1** | **1** | **2.01** |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD** | **Menunjukkan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun meliputi : DPA, RKA, RKAP, DPAP, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang telah disusun : Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi yang harus** |  | **100%** | **5.390.000** | **100%** | **5.605.600** | **100%** | **5.829.824** | **100%** | **6.063.017** | **100%** | **6.305.538** | **100%** | **29.193.979** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun | Menunjukkan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi : RENSTRA, RENJA, RKT, RA, PK, IKU, | Jumlah dokumen Perencanaan, perangkat daerah yang disusun |  | 6 Laporan | 2.100.000 | 6 Laporan | 2.184.000 | 6 Laporan | 2.271.360 | 6 Laporan | 2.362.214 | 6 Laporan | 2.456.703 | 6 Laporan | 11.374.277 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun | Menunjukkan Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah meliputi RKA | Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun |  | 1 dokumen | 350 | 1 dokumen | 364 | 1 dokumen | 378.56 | 1 dokumen | 393.702 | 1 dokumen | 409.45 | 1 dokumen | 1.895.713 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.02 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun | Menunjukkan Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah meliputi dokumen RKA Perubahan | Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah yang disusun |  | 1 dokumen | 350 | 1 dokumen | 364 | 1 dokumen | 378.56 | 1 dokumen | 393.702 | 1 dokumen | 409.45 | 1 dokumen | 1.895.713 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun | Menunjukkan Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah meliiputi dokumen DPA | Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah yang disusun |  | 1 dokumen | 350 | 1 dokumen | 364 | 1 dokumen | 378.56 | 1 dokumen | 393.702 | 1 dokumen | 409.45 | 1 dokumen | 1.895.713 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.01 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun | Menunjukkan Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah meliputi dokumen DPA Perubahan | Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah yang disusun |  | 1 dokumen | 350 | 1 dokumen | 364 | 1 dokumen | 378.56 | 1 dokumen | 393.702 | 1 dokumen | 409.45 | 1 dokumen | 1.895.713 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun | Menunjukkan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja meliputi Laporan Capaian Kinerja, LKJIP, LKPJ | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja yang disusun |  | 4 dokumen | 1.190.000 | 4 dokumen | 1.237.600 | 4 dokumen | 1.287.104 | 4 dokumen | 1.338.588 | 4 dokumen | 1.392.132 | 4 dokumen | 6.445.424 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | Menunjukkan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi Laporan RFK, Laporan RKPD | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun |  | 2 Dokumen | 700 | 2 Dokumen | 728 | 2 Dokumen | 757.12 | 2 Dokumen | 787.405 | 2 Dokumen | 818.901 | 2 Dokumen | 3.791.426 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | **7** | **1** | **1** | **2.02** |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Menunjukkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Kecamatan** | **Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan : jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%** |  | **100%** | **2.043.496.974** | **100%** | **2.125.236.853** | **100%** | **2.210.246.327** | **100%** | **2.298.656.180** | **100%** | **2.390.602.427** | **100%** | **11.068.238.762** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji ASN, Tambahan Penghasilan | Menunjukkan Jumlah ASN | Jumlah ASN |  | 14 Bulan | 1.880.396.974 | 14 Bulan | 1.955.612.853 | 14 Bulan | 2.033.837.367 | 14 Bulan | 2.115.190.862 | 14 Bulan | 2.199.798.496 | 14 Bulan | 10.184.836.552 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  |  | 1 | 1 | 2,02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |  |  |  | 7 Orang | 126.750.000 | 7 Orang | 131.820.000 | 7 Orang | 137.092.800 | 7 Orang | 142.576.512 | 7 Orang | 148.279.572 | 7 Orang | 686.518.884 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan | Menunjukkan Jumlah Laporan GU dan LS | Jumlah Laporan GU dan LS |  | 10 ASN | 35.400.000 | 10 ASN | 36.816.000 | 277 desa | 38.288.640 | 277 desa | 39.820.186 | 277 desa | 41.412.993 | 277 desa | 191.737.819 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | Menunjukkan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun meliputi Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | - | 1 Dokumen | 950 | 1 Dokumen | 988 | 72 Laporan | 1.027.520 | 72 Laporan | 1.068.621 | 72 Laporan | 1.111.366 | 72 Laporan | 5.145.506 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | **7** | **1** | **1** | **2.03** |  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun** | **Menunjukkan Jumlah Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah meliputi Laporan BMD, Rekonsiliasi BMD, Pembayaran Honorarium Penatausahaan BMD** | **Jumlah Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%** |  | **100%** | **9.000.000** | **100%** | **9.360.000** | **100%** | **9.734.400** | **100%** | **10.123.776** | **100%** | **10.528.727** | **100%** | **48.746.903** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.03 | 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Menunjukkan Jumlah Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |  | 1 Orang | 9.000.000 | 1 Orang | 9.360.000 | 1 Orang | 9.734.400 | 1 Orang | 10.123.776 | 1 Orang | 10.528.727 | 1 Orang | 48.746.903 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | **7** | **1** | **1** | **2,06** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi** | **Menunjukkan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi di Kecamatan** | **Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan : Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan yang direncanakan x 100%** |  | **100%** | **104.179.000** | **100%** | **108.346.160** | **100%** | **112.680.006** | **100%** | **117.187.207** | **100%** | **121.874.695** | **100%** | **564.267.068** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2,06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Menunjukkan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia di Kecamatan tahun n | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia di Kecamatan |  | 2 Jenis | 2.000.000 | 2 Jenis | 2.080.000 | 2 Jenis | 2.163.200 | 2 Jenis | 2.249.728 | 2 Jenis | 2.339.717 | 2 Jenis | 10.832.645 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2,06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Menunjukkan Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia di kecamatan pada tahun n | Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia di kecamatan |  | 10 Jenis | 2.990.000 | 10 Jenis | 3.109.600 | 10 Jenis | 3.233.984 | 10 Jenis | 3.363.343 | 10 Jenis | 3.497.877 | 10 Jenis | 16.194.804 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2,06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Menunjukkan Jumlah bahan logistik yang tersedia di kecamatan pada tahun n | Jumlah bahan logistik yang tersedia di kecamatan |  | 25 Jenis | 5.409.000 | 25 Jenis | 5.625.360 | 25 Jenis | 5.850.374 | 25 Jenis | 6.084.389 | 25 Jenis | 6.327.765 | 25 Jenis | 29.296.889 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Penggandaan | Menunjukkan Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang tersedia di kecamatan pada tahun n | Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang tersedia di kecamatan |  | 3 Jenis | 4.000.000 | 3 Jenis | 4.160.000 | 3 Jenis | 4.326.400 | 3 Jenis | 4.499.456 | 3 Jenis | 4.679.434 | 3 Jenis | 21.665.290 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2,06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu |  |  |  | 50 Orang | 6.300.000 |  | 6.552.000 |  | 6.814.080 |  | 7.086.643 |  | 7.370.109 |  | 34.122.832 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2,06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar dan Dalam Daerah | Menunjukkan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana |  | 12 Bulan | 83.480.000 | 12 Bulan | 86.819.200 | 12 Bulan | 90.291.968 | 12 Bulan | 93.903.647 | 12 Bulan | 97.659.793 | 12 Bulan | 452.154.607 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | **7** | **1** | **1** | **2,07** |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah** | **Menunjukkan Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana** | **Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana : Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang direncanakan x 100%** |  | **100%** | **35.730.000** | **100%** | **37.159.200** | **100%** | **38.645.568** | **100%** | **40.191.391** | **100%** | **41.799.046** | **100%** | **193.525.205** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2,07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli | Menunjukkan jumlah (paket) pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang dibeli | jumlah (paket) pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang dibeli |  | 1 Unit | 35.730.000 | 1 Unit | 37.159.200 | 1 Unit | 38.645.568 | 1 Unit | 40.191.391 | 1 Unit | 41.799.046 | 1 Unit | 193.525.205 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | **7** | **1** | **1** | **2,08** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Menunjukkan Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia** | **Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia : Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan x 100%** |  | **100%** | **13.537.600** | **100%** | **14.079.104** | **100%** | **14.642.268** | **100%** | **15.227.959** | **100%** | **15.837.077** | **100%** | **73.324.008** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2,08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Menunjukkan jumlah jasa surat menyurat yang tersedia | jumlah jasa surat menyurat yang tersedia |  | 12 Bulan | 1.500.000 | 12 Bulan | 1.560.000 | 12 Bulan | 1.622.400 | 12 Bulan | 1.687.296 | 12 Bulan | 1.754.788 | 12 Bulan | 8.124.484 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air Bersih dan Internet | Menunjukkan jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi |  | 12 Bulan | 12.037.600 | 12 Bulan | 12.519.104 | 12 Bulan | 13.019.868 | 12 Bulan | 13.540.663 | 12 Bulan | 14.082.289 | 12 Bulan | 65.199.524 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | **7** | **1** | **1** | **2,09** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah** | **Menunjukkan jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang terpelihara** | **jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang terpelihara : jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang direncanakan x 100%** |  | **100%** | **105.476.000** | **100%** | **109.695.040** | **100%** | **114.082.842** | **100%** | **118.646.155** | **100%** | **123.392.001** | **100%** | **571.292.038** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2,09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang terpelihara | Menunjukkan jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik | jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik |  | 9 Unit | 70.516.000 | 9 Unit | 73.336.640 | 9 Unit | 76.270.106 | 9 Unit | 79.320.910 | 9 Unit | 82.493.746 | 9 Unit | 381.937.402 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2,09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Menunjukkan jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara | jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara |  | 3 Jenis | 10.960.000 | 3 Jenis | 11.398.400 | 3 Jenis | 11.854.336 | 3 Jenis | 12.328.509 | 3 Jenis | 12.821.650 | 3 Jenis | 59.362.895 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2,09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Terpelihara | Menunjukkan jumlah gedung/bangunan dalam kondisi baik | jumlah gedung/bangunan dalam kondisi baik |  | 1 Buah | 24.000.000 | 1 Buah | 24.960.000 | 1 Buah | 25.958.400 | 1 Buah | 26.996.736 | 1 Buah | 28.076.605 | 1 Buah | 129.991.741 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  | **Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan** | **7** | **1** | **2** |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana** | **Pelimpahan Kewenangan yang dimaksud disini adalah meliputi koordinasi bantuan sosial, koordinasi bantuan kebencanaan.** | **Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan : Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan x 100%** | **100** | **100** | **0,00** | **100** | **10.000.000** | **100** | **10.400.000** | **100** | **10.816.000** | **100** | **11.248.640** | **100** | **42.464.640** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | **7** | **1** | **2** | **2,02** |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan meliputi pendataan PMKS, terlaksananya PKH, BPNT, KKS, KPM, bantuan kebencanaan** | **Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan : Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang direncanakan x 100%** |  | **100%** | **0,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **0** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | **7** | **1** | **2** | **2,04** |  | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana** | **Menunjukkan Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana** | **Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana** | **-** | **100%** | **0,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **0** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  | **Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan** | **7** | **1** | **3** |  |  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan** | **Menunjukkan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat meliputi PKK, Musrenbang** | **Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan : Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan x 100%** | **NA** | **100%** | **16.332.400** | **100%** | **16.985.696** | **100%** | **17.665.124** | **100%** | **18.371.729** | **100%** | **19.106.598** | **100%** | **88.461.547** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | **7** | **1** | **3** | **2,01** |  | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu** | **Menunjukkan jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan**  **(Keg PKK, Musrenbang Kec,dan Keg Pemberdayaan Masyarakat Lainnya)** | **jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan** |  | **100%** | **16.332.400** | **100%** | **16.985.696** | **100%** | **17.665.124** | **100%** | **18.371.729** | **100%** | **19.106.598** | **100%** | **88.461.547** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | **7** | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu | Menunjukkan Jumlah Musrenbang Kecamatan yang terlaksana tepat waktu | Jumlah Musrenbang Kecamatan yang terlaksana tepat waktu |  | 2 Kegiatan | 4.432.400 | 2 Kegiatan | 4.609.696 | 2 Kegiatan | 4.794.084 | 2 Kegiatan | 4.985.847 | 2 Kegiatan | 5.185.281 | 2 Kegiatan | 24.007.308 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | **7** | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PKK yang di ikuti |  |  |  | 2 Kegiatan | 11.900.000 | 2 Kegiatan | 12.376.000 | 2 Kegiatan | 12.871.040 | 2 Kegiatan | 13.385.882 | 2 Kegiatan | 13.921.317 | 2 Kegiatan | 64.454.238 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina | Menunjukkan jumlah PKK desa yang terbina | jumlah PKK desa yang terbina |  | 11 desa |  | 11 desa |  | 11 desa |  | 11 desa |  | 11 desa |  | 11 desa |  | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  | **Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan** | **7** | **1** | **4** |  |  | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan** | **Menunjukkan Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan** | **Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang dilaksanakan : Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang direncanakan x 100%** | **NA** | **100%** | **3.375.000** | **100%** | **3.510.000** | **100%** | **3.650.400** | **100%** | **3.796.416** | **100%** | **3.948.273** | **100%** | **18.280.089** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | **7** | **1** | **4** | **2.01** |  | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas** | **Menunjukkan Jumlah Penyelenggaraan trantibum meliputi : FKUB, Linmas, Posko Keagamaan, Posko Pilkada/Pilkades** | **jumlah penyelenggaraan trantibum yang terlaksana : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%** |  | **100%** | **3.375.000** | **100%** | **3.510.000** | **100%** | **3.650.400** | **100%** | **3.796.416** | **100%** | **3.948.273** | **100%** | **18.280.089** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | 7 | 1 | 4 | 2,01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Menunjukkan Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi | Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi |  | 4 Kegiatan | 2.500.000 | 4 Kegiatan | 2.600.000 | 4 Kegiatan | 2.704.000 | 4 Kegiatan | 2.812.160 | 4 Kegiatan | 2.924.646 | 4 Kegiatan | 13.540.806 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 4 | 2,01 | 2 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Menunjukkan Jumlah Rakor FKUB yang di Laksanakan | Jumlah Rakor FKUB yang di Laksanakan |  | 2 Kegiatan | 875 | 2 Kegiatan | 910 | 2 Kegiatan | 946.4 | 2 Kegiatan | 984.256 | 2 Kegiatan | 1.023.626 | 2 Kegiatan | 4.739.282 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  | **Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **7** | **1** | **5** |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Menunjukkan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Kerukunan Antar Suku Agama,Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Demokrasi Pancasila dan dan pelaksanaan tugas Forkompimcan** | **Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan : Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%** | **NA** | **100** | **74.281.400** | **100** | **64.281.400** | **100** | **66.852.656** | **100** | **69.526.762** | **100** | **72.307.833** | **100** | **347.307.833** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | **7** | **1** | **5** | **2,01** |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi** | **Menunjukkan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi : HUT RI, MTQ, Safari Ramadhan, Kegiatan Keagamaan** | **Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan : Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%** |  | **100%** | **74.281.400** | **100%** | **77.252.656** | **100%** | **80.342.762** | **100%** | **83.556.473** | **100%** | **86.898.732** | **100%** | **402.332.023** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | 7 | 1 | 5 | 2,01 | 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan | Menunjukkan Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang di laksanakan | Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang di laksanakan |  | 1 Kegiatan | 17.114.800 | 1 Kegiatan | 17.799.392 | 1 Kegiatan | 18.511.368 | 1 Kegiatan | 19.251.822 | 1 Kegiatan | 20.021.895 | 1 Kegiatan | 92.699.277 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 5 | 2,01 | 7 | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan | Menunjukkan Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Dilaksanakan | Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Dilaksanakan |  | 3 Kegiatan | 57.166.600 | 3 Kegiatan | 59.453.264 | 3 Kegiatan | 61.831.395 | 3 Kegiatan | 64.304.650 | 3 Kegiatan | 66.876.836 | 3 Kegiatan | 309.632.745 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  | **Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan** | **7** | **1** | **6** |  |  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Menunjukkan Jumlah Fasilitasi penyelnggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan termasuk pilkades, penjaringan perangkat desa, rakoor pembakal, pengelolaan keuamgam dan aset desa, Terfasilitasinya penyelenggaraan pilkades, penjaringan perangkat desa keuangan dan aset desa penyelenggaraan pemilihan BPD penyelnggaraan tapal batas, terfasilitasinya BKAD, Pelayanan PBB** | **Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi : jumlah fasilitasi yang direncanakan x 100%** | **NA** | **100%** | **21.825.600** | **100%** | **22.698.624** | **100%** | **23.606.569** | **100%** | **24.550.832** | **100%** | **25.532.865** | **100%** | **118.214.490** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | **7** | **1** | **6** | **2,01** |  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **Menunjukkan Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana meliputi : Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; Administrasi Tata Pemerintahan Desa; Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa; Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa; Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta penetapan dan Penegasan Batas Desa** | **Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana** |  | **100%** | **21.825.600** | **100%** | **22.698.624** | **100%** | **23.606.569** | **100%** | **24.550.832** | **100%** | **25.532.865** | **100%** | **118.214.490** | **Cinta Puri Darussalam** | **Kab. Banjar** |
|  |  | 7 | 1 | 6 | 2,01 | 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi | Menunjukkan Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi | Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi |  | 11 Desa | 2.731.200 | 11 Desa | 2.840.448 | 11 Desa | 2.954.066 | 11 Desa | 3.072.229 | 11 Desa | 3.195.118 | 11 Desa | 14.793.060 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |
|  |  | 7 | 1 | 6 | 2,01 | 5 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi | Menunjukkan Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi | Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi |  | 4 Kegiatan | 19.094.400 | 4 Kegiatan | 19.858.176 | 4 Kegiatan | 20.652.503 | 4 Kegiatan | 21.478.603 | 4 Kegiatan | 22.337.747 | 4 Kegiatan | 103.421.429 | Cinta Puri Darussalam | Kab. Banjar |

# BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cintapuri Darussalam dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2021 – 2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cintapuri Darussalam disajikan pada tabel 7.1, dibawah ini :

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cintapuri Darussalam

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Satuan** | **Kondisi Kinerja pada Awal Periode**  **RPJMD** | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode**  **RPJMD** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2026** |
| Nilai Evaluasi Kecamatan | Nilai | NA | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 85 |

Sumber data : Data di olah

# BAB VIII

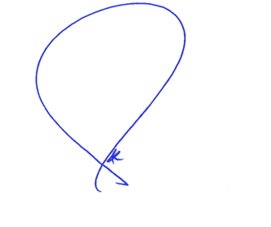
# PENUTUP

Demikian penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Perangkat Daerah Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2021- 2016, sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi, didalam mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Cintapuri Darussalam dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2021 - 2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cintapuri Darussalam, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, Rencana Strategis Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Cintapuri Darussalam secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Cintapuri Darussalam.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi pedoman untuk seluruh aparatur di Kecamatan dalam penyusunan program dan kegiatan maupun sub kegiatan dalam rangka ikut mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

Cintapuri Darussalam, 31 Desember 2021

Camat Cintapuri Darussalam

**H. SUYITNO S.Sos.M.AP**

Pembina Tk. I

NIP. 19660715 198803 1 013